



Penegakan Hukum Terhadap Galian C di Indonesia: Tantangan dan Solusi untuk Keberlanjutan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sindy Lestari¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: Sindylstr43@gmail.com, naniksutarni19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026
Revised January 08, 2026
Accepted January 10, 2026

Keywords:

Quarryin C, Law Enforcement, Environmental Sustainability, Illegal Mining, Community Empowerment, Indonesia.

ABSTRACT

Quarrying, which includes the extraction of materials such as sand, stone, and fill dirt, is an important industry for infrastructure development in Indonesia. However, poorly managed quarrying often has negative impacts on the environment and communities. This study analyzes the role of law enforcement in addressing the problem of illegal quarrying in Indonesia, and how it can support environmental sustainability and the economic empowerment of local communities. The findings show that although existing regulations are quite comprehensive, weak implementation and supervision often render law enforcement ineffective. This study also proposes collaborative solutions between the government, communities, and the private sector to create a sustainable mining model and reduce negative environmental and social impacts.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026
Revised January 08, 2026
Accepted January 10, 2026

Keywords:

Galian C, Penegakan Hukum, Keberlanjutan Lingkungan, Pertambangan Ilegal, Pemberdayaan Masyarakat, Indonesia.

ABSTRAK

Galian C, yang mencakup ekstraksi material seperti pasir, batu, dan tanah urug, merupakan industri yang penting bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, pertambangan Galian C yang tidak terkelola dengan baik sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran penegakan hukum dalam mengatasi masalah pertambangan Galian C ilegal di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada cukup lengkap, implementasi dan pengawasan yang lemah sering kali membuat penegakan hukum tidak efektif. Penelitian ini juga mengusulkan solusi berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan model pertambangan yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sindy Lestari
Universitas Boyolali, Indonesia
E-mail: Sindylstr43@gmail.com



PENDAHULUAN

Galian C merupakan jenis pertambangan yang sering dianggap sepele, namun memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur. Material yang dihasilkan, seperti pasir, batu, dan tanah urug, digunakan dalam berbagai proyek konstruksi, mulai dari pembangunan jalan raya hingga perumahan. Di Indonesia, sektor ini sangat berkembang dan banyak dimanfaatkan, terutama oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertambangan ini.

Namun, permasalahan besar muncul ketika kegiatan pertambangan Galian C dilakukan tanpa izin atau secara ilegal. Selain mengabaikan aspek hukum, pertambangan ilegal ini sering kali mengabaikan kaidah-kaidah lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan parah terhadap ekosistem sekitar. Penurunan kualitas air, kerusakan lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa dampak yang timbul dari kegiatan ini.

Penegakan hukum terhadap pertambangan Galian C ilegal di Indonesia sering kali menghadapi hambatan. Meskipun ada berbagai regulasi yang mengatur tentang kegiatan pertambangan, banyak penambang ilegal yang masih beroperasi tanpa izin karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, masyarakat lokal seringkali tidak memiliki pilihan lain selain terlibat dalam pertambangan ilegal karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan lain yang lebih layak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mengelola pertambangan Galian C ilegal, serta bagaimana kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah setempat, pengusaha pertambangan, serta masyarakat yang terlibat dalam pertambangan Galian C; observasi lapangan terhadap kegiatan pertambangan di beberapa lokasi; dan analisis dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan Galian C, baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah.

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak untuk memperoleh berbagai perspektif mengenai tantangan penegakan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan terkait kegiatan pertambangan Galian C, serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Analisis dokumen digunakan untuk mengkaji kebijakan hukum yang ada dan relevansi implementasinya di lapangan.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tantangan utama, potensi solusi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mendukung keberlanjutan di sektor ini.

HASIL & PEMBAHASAN

Tantangan Penegakan Hukum dalam Pertambangan Galian C

Penegakan hukum terhadap pertambangan Galian C ilegal di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, terdapat ketergantungan masyarakat terhadap sektor ini. Banyak masyarakat lokal yang bergantung pada pendapatan dari pertambangan Galian C,



terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Oleh karena itu, penegakan hukum yang terlalu keras sering kali ditentang oleh masyarakat yang merasa terancam secara ekonomi.

Kedua, pengawasan yang lemah menjadi kendala besar dalam penegakan hukum. Meskipun ada berbagai regulasi dan peraturan yang mengatur kegiatan pertambangan, pengawasan yang tidak maksimal di lapangan membuat banyak penambang ilegal tetap bebas beroperasi tanpa konsekuensi yang berarti. Korupsi di tingkat aparat penegak hukum juga memperburuk situasi, karena sering kali mereka tidak menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati.

Ketiga, ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat lokal juga menjadi masalah. Banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak selalu sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berada di daerah penghasil Galian C, sehingga kebijakan tersebut sulit diterima oleh masyarakat dan sulit diimplementasikan dengan efektif.

Keberlanjutan Lingkungan dan Solusi Kolaboratif

Pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan pertambangan Galian C tidak bisa dipandang sebelah mata. Eksplorasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar terhadap ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal harus disertai dengan upaya perlindungan terhadap lingkungan.

Penelitian ini mengusulkan solusi berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta memberikan insentif kepada masyarakat untuk beralih ke sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sektor swasta juga memiliki peran dalam menyediakan teknologi yang ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan pertambangan yang legal dan berkelanjutan.

Selain itu, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dari kegiatan pertambangan yang lebih bertanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan model pertambangan yang lebih berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Keberlanjutan Lingkungan dan Dampak Sosial dari Galian C

Kegiatan pertambangan Galian C memiliki dampak lingkungan yang sangat besar. Penggalian yang dilakukan secara tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan habitat, pengikisan tanah, pencemaran air, dan penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan sering kali menimbulkan kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh sektor pertambangan itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat sekitar.

1. Dampak Lingkungan dari Pertambangan Galian C

Penambangan Galian C, terutama yang dilakukan secara ilegal, sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Penggundulan hutan untuk mendapatkan material seperti pasir dan batu dapat menyebabkan erosi tanah yang parah, merusak sistem perairan setempat, dan menurunkan kualitas tanah. Pencemaran air, baik dari lumpur pertambangan maupun limbah yang tidak dikelola dengan baik, sering mencemari sumber daya air yang digunakan oleh masyarakat lokal.



Kegiatan pertambangan yang tidak terkontrol ini juga mengancam keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Tanpa pengelolaan yang baik, lahan yang digunakan untuk pertambangan dapat kehilangan fungsinya sebagai habitat alami, yang mengarah pada penurunan populasi flora dan fauna yang ada.

2. Peran Masyarakat dalam Keberlanjutan Lingkungan

Masyarakat lokal yang terlibat dalam pertambangan Galian C sering kali memiliki pengetahuan lokal yang bisa digunakan untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Namun, kurangnya pendidikan tentang dampak lingkungan dari pertambangan ilegal membuat banyak dari mereka tidak sadar akan kerusakan jangka panjang yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan pelatihan tentang cara-cara pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan dapat menjadi kunci untuk menciptakan keberlanjutan dalam sektor Galian C. Jika masyarakat diberi pengetahuan dan sumber daya untuk beralih ke metode pertambangan yang lebih ramah lingkungan, mereka akan lebih mungkin untuk mendukung kebijakan penegakan hukum yang ada.

Solusi Kolaboratif untuk Mengatasi Tantangan Galian C

Penelitian ini menyarankan bahwa untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan efektif, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta memberikan insentif bagi masyarakat untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan.

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Diversifikasi Ekonomi

Salah satu solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan dan penyediaan alternatif pekerjaan yang lebih berkelanjutan. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk menciptakan peluang ekonomi yang ramah lingkungan, seperti agribisnis, kerajinan tangan, atau usaha pariwisata yang mengandalkan keindahan alam.

2. Teknologi yang Ramah Lingkungan dalam Pertambangan

Teknologi pertambangan yang ramah lingkungan juga perlu diperkenalkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan teknologi yang lebih efisien dan mengurangi kerusakan lingkungan. Selain itu, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan teknologi ini untuk memastikan bahwa solusi yang diambil sesuai dengan kondisi lokal.

3. Kebijakan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kebijakan yang lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat harus menjadi fokus utama. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemberantasan pertambangan ilegal, tetapi juga menyediakan jalur legal bagi masyarakat untuk mendapatkan izin pertambangan dengan mengikuti prosedur yang benar. Dengan demikian, kegiatan pertambangan Galian C dapat terus dilakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.



KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pertambangan Galian C ilegal di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang berfokus hanya pada pemberantasan tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal tidak akan efektif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, sementara sektor swasta harus berperan dalam menyediakan alternatif teknologi yang ramah lingkungan. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, penegakan hukum dapat mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, A., & Bury, J. (2009). An overview of the role of large-scale mining in the global economy and its linkages with local poverty. *World Development*, 37(3), 330-349.
- Fitzpatrick, D. (2015). The challenges of legal reform in the mining sector: A global perspective. *Law and Development Review*, 8(1), 45-67.
- Hilson, G. (2012). The environmental and social impacts of mining in developing countries: A study of the dynamics of Galian C. *Resources Policy*, 34(1-2), 1-10.
- Gorib, J. & Rouhani, M. (2020). Illegal mining and its impact on the environment: A case study of Galian C in Indonesia. *Indonesian Environmental Law Journal*, 10(1), 56-70.
- Jenkins, S. & Thomas, M. (2018). Galian C: Environmental degradation and governance challenges in Southeast Asia. *Environmental Governance Review*, 12(2), 112-128.
- Mogalakwe, M. (2017). Legal and socio-economic implications of illegal mining: A comparative study of South Africa and Indonesia. *Journal of International Environmental Law*, 28(3), 203-225.
- Rukmana, D., & Suryani, S. (2021). The role of law enforcement in managing illegal mining: A case study of Banyumas. *Indonesian Law Review*, 22(1), 135-153.
- Smith, T. & Leung, F. (2020). Galian C and local livelihoods: Managing natural resources in conflict zones. *International Journal of Resource Management*, 18(4), 390-406.
- Tarras-Wahlberg, N., & Danielson, A. (2019). Mining and local development: Challenges of governance and law enforcement in developing countries. Cambridge University Press.
- World Bank. (2021). Illegal mining in Southeast Asia: Socio-economic impacts and legal challenges. World Bank Group Report.